



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN AMALI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Amali Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan pada tahun 2020 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Kecamatan, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Amali, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang butuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motivasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Taretta, 01 Juli 2019

**CAMAT AMALI**

**H. A. MASSALESSE, SH, MH**  
**NIP. 19620221 198905 1 001**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG .....1

1.2 LANDASAN HUKUM .....3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....13

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI PD .....18

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....19

2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT .....23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....24

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH .....25

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....27

BAB V PENUTUP .....33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Amali secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, maka perlu adanya Rencana Kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Amali membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program – program pembangunan, kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2020. Renja Kecamatan Amali tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Renja Kecamatan Amali menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bone ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, provinsi dan pusat.

Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya

seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Renja Kecamatan Amali juga memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Amali, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan. Kecamatan Amali Kabupaten Bone menyusun Renja Tahun 2020 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- ♦ Renja Kecamatan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Kecamatan yang ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- ♦ Renja merupakan acuan Kecamatan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020;
- ♦ Renja Kecamatan merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Kecamatan, orientasi mengenai RKPD dan Renja Kecamatan, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan Renja Kecamatan merupakan tahapan penyempurnaan dokumen rancangan Renja menjadi dokumen Renja Kecamatan yang difinitif, antara lain :

- Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2020;
- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020;

- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

Sebagai sebuah dokumen resmi kecamatan, Renja Kecamatan Amali mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan kecamatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang Responsif, Integratif dan akuntabel, Kecamatan Amali Kabupaten Bone dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Amali dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81). Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13. Surat Edaran Bupati Bone Nomor : 050/99/III/BAPPEDA tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3).
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- \* Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Amali Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Amali pada Tahun 2020.
- \* Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Amali Tahun 2020 adalah:
  1. Sebagai pedoman bagi aparat perencana Kecamatan Amali dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020 selama (satu) tahun kedepan.
  2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Amali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2020.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Bab I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

## 1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tahun Lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

### 2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

### 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan**

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Amali Tahun 2020 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) dan melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya, untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Renja Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Bone dan dijabarkan ke dalam tabel T.C.29 sebagai berikut :

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Amali dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Amali s/d Tahun 2019**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Kecamatan Amali

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangat Daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									

<b>1</b>	<b>20</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Listrik dan Air	24	24	24	24	100%	24	24	100%
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun	72	72	72	72	100%	72	72	100%
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	Jumlah Media yang menyediakan Bahan Bacaan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	20	01	23	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti	120	96	60	60	100%	60	120	100%
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	12	12	12	12	100%	12	12	100%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2	2	2	2	100%	2	2	100%

1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	3	3	3	3	100%	3	3	100%
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	2	2	2	2	100%	2	2	100%
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	12	12	12	12	100%	12	36	100%
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	24	24	24	24	100%	24	24	100%
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	36	36	12	12	100%	12	60	100%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>08</b>		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>									
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun	5	5	5	5	100%	5	5	100%
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>									
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	3	3	3	3	100%	3	3	100%

<b>1</b>	<b>20</b>	<b>31</b>		<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>									
1	20	31	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	14	14	14	14	100%	14	14	100%
1	20	31		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan									
				Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	2	2	2	2	100%	2	2	100%
1	20	31	05	Peningkatan Operasional Kelurahan	Jumlah Operasional Kelurahan Mampotu	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	20	80		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>								

1	20	80	820	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana prasarana lingkungan pemukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah Kelurahan Mampootu	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana prasarana lingkungan pemukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah Kelurahan Mampootu	1	0	0	1	100%	1	1	100%
				Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampootu	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampootu	1	1	0	0	100%	1	1	100%
1	20	81		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>								
1	20	09	818	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Mampotu	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Mampotu	1	1	0	0	100%	1	1	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Amali dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yakni :

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatnya Disiplin Sumber daya Aparatur
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Peningkatan serta pemutakhiran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2020 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
  - Struktur organisasi Kantor Camat Amali Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
  - Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
  - Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati
  - Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
  - Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
  - Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :
  - Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

- Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Amali terutama pada jajaran staf.
- Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer.
- Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Amali yang dijabarkan kedalam tabel T-C.30 sebagai berikut :

**Tabel T-C.30.**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Amali  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Rekening Telpon, Listrik dan Air (rekening)			24	36	36	36	24	36	36	36	
2	Jumlah Tenaga Adminstrasi yang mendapatkan jasa administrasi keuangan selama setahun (orang)			72	72	72	72	72	72	72	72	
3	Jumlah Media yang menyediakan bahan bacaan (Media)			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti			120	120	128	140	120	120	128	140	
5	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi			12	12	12	12	12	12	12	12	

	perkantoran (paket)											
6	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor (unit)			-	-	2	2	-	-	2	2	
7	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor (unit)			-	-	3	3	-	-	3	3	
8	Jumlah pengadaan Mebeleur (paket)			2	2	2	2	2	2	2	2	
9	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
10	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (kegiatan)			24	24	24	24	24	24	24	24	
11	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor ((kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
12	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun			5	5	5	5	5	5	5	5	
13	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)			14	14	14	14	14	14	14	14	
14	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TSKS (dokumen)			2	2	2	2	2	2	2	2	

15	Jumlah Operasional Kelurahan Mampotu (kegiatan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
16	Jumlah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah Kelurahan Mampootu			1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampootu			1	1	1	1	1	1	1	1	
18	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Mampotu			1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)			3	3	3	3	3	3	3	3	

### **2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Kecamatan Amali sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Amali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 2) Pelayanan Prima. Kecamatan Amali sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan Prima, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bone, tentang pengembangan bidang Pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata

yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Amali harus betul-betul memanfaatkan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja Tahun 2020. Tabel T-C.31 berikut ini







## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan kegiatan Kecamatan Amali pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan Peningkatan kualitas aparatur.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak retribusi.
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Tripika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada diwilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Amali maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2020 adalah “**Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**”.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembanguna Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Nasional	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone
1	Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaan
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

Peran Kecamatan Amali sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan – kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Amali adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se- Kecamatan Amali baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Bone yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan**

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2020 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Menciptakan keamanan dan dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemeratan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan..
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sasaran Renja Kecamatan Kecamatan Amali Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Adapun program di Kecamatan Amali adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
  - e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan Mebeleur
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Penunjang Pemerintahan Umum
  - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)
5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri atas :
  - a. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
  - b. Peningkatan Operasional Kelurahan Mampotu
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, terdiri atas :
  - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana

Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah jalan Kelurahan Mampotu.

- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampotu.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- a. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Mampotu.

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN**

Rencana Kerja Kecamatan Amali Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif). Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program perangkat daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini (Tabel C.33).

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**

SKPD : 1200923 - KECAMATAN AMALI

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN WAJIB				913.236.000,00				991.708.700,00
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				913.236.000,00				991.708.700,00
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	192.316.000,00			100 %	211.546.700,00
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Telpn, Listrik, dan Air	Kecamatan Amali	24 Rekening	5.625.000,00	APBD		Rekening	6.187.500,00
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun	Kecamatan Amali	72 Orang	24.972.000,00	APBD		Orang	27.469.200,00
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media yang menyediakan Bahan Bacaan	Kecamatan Amali	12 Media	960.000,00	APBD		Media	1.056.000,00
1	20	01	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti	Kecamatan Amali	128 Kegiatan	83.590.000,00	APBD		Kegiatan	91.949.000,00
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Amali	12 Paket	77.169.000,00	APBD		Paket	84.885.000,00
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		100 %	108.691.000,00			100 %	120.880.100,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Amali	2 Unit	3.000.000,00	APBD		2 Unit	3.300.000,00
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Amali	3 Buah	22.250.000,00	APBD		3 Buah	24.475.000,00
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Amali	2 Paket	8.300.000,00	APBD		2 Paket	9.130.000,00
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Amali	12 Kegiatan	23.572.600,00	APBD, DAU		12 Kegiatan	27.249.860,00
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin	Kecamatan Amali	2 Unit	46.318.400,00	APBD		2 Unit	50.950.240,00
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Amali	12 kegiatan	5.250.000,00	APBD		12 kegiatan	5.775.000,00
1	20	08		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>100 %</b>	<b>19.554.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>21.536.900,00</b>
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang Tersusun	Kecamatan Amali	5 Dokumen	19.554.000,00	APBD		5 Dokumen	21.536.900,00
1	20	19		<b>Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa</b>		<b>100 %</b>	<b>25.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>27.500.000,00</b>
1	20	19	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	Kecamatan Amali	14 Laporan	25.000.000,00	APBD		14 Laporan	27.500.000,00
1	20	20		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan</b>		<b>100 %</b>	<b>27.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>29.700.000,00</b>
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	Kecamatan Amali	3 Kali	27.000.000,00	APBD		Kali	29.700.000,00
1	20	31		<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pennyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan</b>		<b>100 %</b>	<b>161.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>179.575.000,00</b>

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	31	01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Kecamatan Amali	2 Dokumen	45.000.000,00	DAU		2 Dokumen	51.975.000,00
1	20	31	51	Peningkatan Operasional Kelurahan Mampotu	Jumlah Operasional Kelurahan Mampotu	Kelurahan Mampotu	1 Kelurahan	116.000.000,00	DAU		1 Kelurahan	127.600.000,00
1	20	80		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>		<b>100 %</b>	<b>359.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>373.470.000,00</b>
1	20	80	820	Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Mampotu	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Mampotu	Kelurahan Mampotu	1 Paket	27.700.000,00	APBD		1 Paket	30.470.000,00
1	20	80	827	Pengadaan,Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampotu	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Mampotu	Amali	1 Paket	331.300.000,00	DAU		Paket	343.000.000,00
1	20	81		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Cakupan Realisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		<b>100 %</b>	<b>20.675.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>27.500.000,00</b>

1	20	81	818	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Mampotu	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Mampotu	Kelurahan Mampotu	1 Kegiatan	20.675.000,00	DAU		Kegiatan	27.500.000,00
---	----	----	-----	--	--	-------------------	------------	---------------	-----	--	----------	---------------

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Amali merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan.

Keberhasilan suatu program kegiatan, sangat ditentukan oleh perencanaan, tanpa sebuah perencanaan yang baik tidak mungkin tugas yang sudah ditetapkan akan tercapai dengan optimal. Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Amali disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2020. Rencana Kerja Kecamatan Amali yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan, kepala seksi dan seluruh staf Kecamatan Amali demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2020, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Perencana dan Pengambil Kebijakan di lingkungan Kecamatan Amali Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, kami harapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan Kecamatan Amali yang berintegritas dan professional.